

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar dapat terkontrol, selain itu hukum juga merupakan aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Setiap masyarakat berhak mendapatkan pembelaan didepan hukum, sehingga hukum itu memuat peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan apabila melanggar akan mendapatkan sanksi.

Hukum sebagai peraturan yang di buat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak, undang-undang, ketentuan, kaedah, patokan, dan keputusan hakim (Suharso dkk, 2005:171). Hukum merupakan petunjuk hidup, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat karena dapat menimbulkan tindakan pelanggaran oleh pemerintah atau penguasa (Utrecht, 2012:11).

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat ketaatan hukum warganya. Semakin tinggi ketaatan hukum warga suatu negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakatnya. Sebaliknya, jika ketaatan hukum warga suatu negara rendah, yang berlaku adalah hukum rimba. Pentingnya ketaatan hukum

dalam suatu negara sangat diperlukan untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat sebagai aturan yang harus ditaati. Karena itu Indonesia sebagai negara hukum, dalam kehidupan masyarakatnya tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Aturan-Aturan tersebut harus ditaati sepenuhnya. Aturan tersebut diharapkan dapat menciptakan ketertiban dalam lingkungan masyarakat. Karena itu pemberian sanksi atau hukuman terhadap pelanggar aturan perlu diberikan.

Negara Indonesia merupakan negara hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945), namun banyak warga negara yang melanggar hukum atau peraturan tersebut. Peraturan yang sudah disepakati, diberlakukan serta diterapkan dalam masyarakat, masih banyak yang dilanggar. Hal tersebut tidak hanya di kalangan pemerintah, masyarakat, tetapi juga menyebar ke instansi-instansi termasuk lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah. Ketaatan hukum mempunyai kaitan yang erat dengan hukum. Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum (Lemaire, 1952:46). Sumber segala hukum adalah kesadaran hukum (Apeldoorn, 1954:9). Menurut pendapatnya maka yang disebut hukum hanyalah yang memenuhi kesadaran hukum, maka undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum warga negara akan kehilangan kekuatan hukum yang mengikat.

Akhir-akhir ini telah terjadi pelanggaran hukum, hal tersebut dimuat dalam surat kabar yang beritanya tentang pelanggaran-pelanggaran hukum, baik yang berupa pelanggaran, kejahatan, maupun perbuatan melawan hukum, dan ingkar janji atau penyalahgunaan hak. Selain itu juga berita tentang penipuan, penjiplakan, penodongan, pembunuhan, tabrak lari dan lain sebagainya, berita

seperti itu dapat dibaca dalam surat kabar. Ironisnya ialah bahwa sebagian warga negara yang tidak mengetahui hukum dalam melakukan segala sesuatunya, baik itu petugas penegak hukum atau bukan. Pelanggaran hukum setiap tahunnya mengalami peningkatan sekitar 78,2%, kejahatan atau pelanggaran itu dilakukan dari berbagai kalangan (Hadiman, 1995).

Maraknya aksi kejahatan di Indonesia, terutama untuk kasus pencurian sepeda motor dibuktikan dengan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Data Mabes Polri pada tahun 2010-2013 peningkatannya mencapai 1000 sepeda motor setiap tahunnya. Sedangkan data kriminalitas Polres Grobogan tahun 2002-2004 tercatat 133 sepeda motor hilang yang dilaporkan masyarakat kepada pihak berwajib atau kepolisian. Dari jumlah kendaraan 29 buah (21,8%) ditemukan masih ditangan pencuri, sisanya sebanyak 104 (78,2%) tidak dapat ditemukan yang kemungkinan masih ditangan penadah sepeda motor. Sedangkan penadah sepeda motor yang berhasil diungkap sebanyak 4 orang yang semuanya dikenakan sanksi pasal 480 sebagai penadahan biasa. Dengan demikian keadaan tersebut membuat masyarakat merasa tidak aman. Padahal para pemiliknya sudah memasang kunci pengaman, namun ternyata pencuri tetap masih ada kesempatan untuk melakukan aksinya. Tidak salah lagi jika dikatakan bahwa pencurian sepeda motor tidak hanya meningkat secara kuantitas namun juga secara kualitasnya. Melihat data kriminalitas di atas, dapat diketahui adanya kesenjangan cukup tinggi antara masyarakat yang kehilangan kendaraan bermotor dengan masyarakat yang sepeda motornya dikembalikan (Lestari, 2012).

Seorang penadah merupakan salah satu perbuatan yang menolong dalam hal kejahatan karena menampung suatu barang yang diperoleh dengan cara haram, maka dari itu sebagai umat beragama tidak boleh melakukan perbuatan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XXX mengenai “Pertolongan (jahat)” pasal 480 ayat 1 dan 482 melarang tegas dan mengancam dengan hukuman penjara atau denda.

Dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun atau dengan sebanyak-banyaknya Rp 900,-, dihukum: 1 e. Karena sebagai sekongkol, barang siapa yang membeli, menyewa, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya di peroleh karena kejahatan (480). Barang siapa yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda yang diperoleh karena kejahatan (481 ayat 1). Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 480 sebagai tadah ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,- jika barang tersebut diperoleh karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 364, 373 dan 379 (482).

Keberadaan penadah dapat melahirkan berbagai bentuk kejahatan di masyarakat, hal tersebut seharusnya mendapatkan penanganan yang serius. Masih tingginya pencurian dan pembelian sepeda motor yang belum ditemukan oleh aparat kepolisian sebagai pihak yang paling awal dan pertama yang berhadapan dengan kejahatan jelas pihak tersebut mengalami kesulitan dalam mengungkapnya. Maka dari itu dalam pengungkapan kasus penadahan sepeda motor dibutuhkan peran serta masyarakat. Guna menumbuhkan peran serta masyarakat harus terlebih dahulu tumbuh kesadaran dan ketaatan hukum. Oleh karena menarik untuk melakukan penelitian mengenai pemahaman dan ketaatan hukum masyarakat khususnya dalam jual beli motor hasil curian di Desa Ngrandu Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan.

Pembentukan ketaatan hukum masyarakat sudah dilakukan di sekolah, salah satunya melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Mata pelajaran ini merupakan sarana untuk melahirkan generasi muda agar dapat mengaktualisasikan dan melestarikan demokrasi (Rosyda dkk, 2003:17-18). Siswa yang sudah mengikuti mata pelajaran PKn sesuai jenjangnya memiliki kompetensi *Civic Knowledge*, *Civil Skill*, dan *Civic Dispotion*. *Civic Knowledge*, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan pengetahuan yang berhubungan dengan keilmuan kewarganegaraan, sedang *Civil Skill*, yaitu kompetensi yang menyangkut kemampuan atau keterampilan untuk memasuki kehidupan masyarakat yang lebih baik, sedangkan *Civic Dispotion*, yaitu setelah pembelajaran selesai terbentuk watak siswa yang pancasilais, watak-watak baik bersumber dari kepribadian bangsa Indonesia (Ikhsan dkk, 2007:5).

Peran mata pelajaran PKn untuk penanaman ketaatan hukum dipertegas dalam visi, misi, dan tujuannya. Visi PKn ialah sebagai sumber nilai dalam mengantarkan siswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Visi ini berdasarkan realitas yang dihadapi siswa sebagai generasi bangsa yang harus memiliki visi intelektual, religius, berkeadaban, berkemanusiaan, dan cinta tanah air dan bangsanya. Sedangkan misi PKn adalah untuk membantu siswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral (Rahayu, 2013:2-3). Visi dan misi tersebut, selanjutnya dirumuskan tujuan PKn yaitu untuk menumbuhkan wawasan dan

kesadaran bernegara, serta membentuk sikap dan perilaku cinta tanah air yang bersendikan kebudayaan dan filsafat bangsa Pancasila (Rahayu, 2013:3).

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan PKn di atas, maka calon guru PKn harus dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dan menumbuhkan wawasan kesadaran bernegara serta senantiasa memahami dan mentaati hukum di masyarakat sebagai bagian dari perwujudan rasa tanggung jawab dan bermoral. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, mendorong peneliti untuk meneliti mengenai pemahaman dan ketaatan hukum masyarakat desa pada kasus jual beli motor hasil curian di Desa Ngrandu, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan. Alasan penelitian memilih kasus jual beli motor hasil curian atau penadahan kendaraan bermotor dikarenakan di dalam penadahan tersebut tidak seperti jual beli normal pada umumnya. Hanya ada satu atau dua orang saja yang berperan ganda dalam melakukan kegiatan penadahan kendaraan bermotor.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat mengenai ketaatan hukum dalam jual beli sepeda motor di masyarakat desa Ngrandu Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan tahun 2013?

2. Bagaimana kendala ketaatan hukum dalam pembelian sepeda motor hasil curian pada masyarakat desa Ngrandu Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan tahun 2013?
3. Bagaimana solusi mengatasi kendala ketaatan hukum dalam jual beli sepeda motor hasil curian pada masyarakat desa Ngrandu Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan tahun 2013?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan pemahaman mengenai ketaatan hukum jual beli sepeda motor hasil curian di masyarakat desa Ngrandu Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan tahun 2013.
2. Untuk mendeskripsikan kendala dalam pelaksanaan ketaatan hukum dalam jual beli sepeda motor hasil curian pada masyarakat desa Ngrandu Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan tahun 2013.
3. Untuk mendeskripsikan solusi dalam mengatasi kendala ketaatan hukum dalam jual beli sepeda motor hasil curian pada masyarakat desa Ngrandu Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan tahun 2013.

#### **D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan di atas maka dapat dirumuskan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil Penelitian ini dapat menjadi sumbangan untuk pengembanagn konsep mengenai ketaatan hukum masyarakat dalam jual beli sepeda motor hasil curian. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan penelitian yang relevan berikutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Manfaat bagi Pemerintah**

Melalui kegiatan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu masukan dan kerangka acuan yang sangat berharga bagi para pengambil keputusan terutama ketaatan hukum masyarakat desa dalam kasus jual beli sepeda motor.

###### **b. Manfaat bagi Masyarakat**

Melalui kegiatan penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan dan memperbaiki pelaksanaan ketaatan hukum pada masyarakat dalam jual beli sepeda motor.

#### **E. Daftar Istilah**

Daftar istilah merupakan “suatu penjelasan istilah yang diambil dari kata-kata kunci dalam judul penelitian” (Maryadi dkk, 2010:11). Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



1. Pemahaman, berasal dari kata paham yang artinya pengertian, pengetahuan, pendapat, pikiran, aliran atau pandangan (Depdikbud, 1994:74), sehingga dapat diartikan bahwa pemahaman adalah “suatu proses, cara memahami cara mempelajari baik-baik supaya paham dan pengetahuan banyak”. Pemahaman (*comprehension*) “siswa diminta untuk membuktikan bahwa bisa memahami hubungan yang sederhana diantara fakta-fakta atau konsep” (Arikunto, 1995: 115). Pemahaman bukan kegiatan berpikir semata, melainkan pemindahan letak dari dalam berdiri disituasi atau dunia orang lain (Poesprodjo, 1987:52-53). Mengalami kembali situasi yang dijumpai pribadi lain didalam *erlebnis* (sumber pengetahuan tentang hidup, kegiatan melakukan pengalaman pikiran), pengalaman yang terhayati. Pemahaman merupakan suatu kegiatan berpikir secara diam-diam, menemukan dirinya dalam orang lain. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pemahaman adalah kemampuan berfikir yang dimiliki seseorang untuk dapat memahami, mengerti, dan mengetahui tentang hidup dalam melakukan kegiatan berfikir secara diam-diam kemudian menemukan dirinya pada orang lain.
2. Ketaatan hukum, merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila dilaksanakan akan timbul sanksi, tidaklah demikian dengan ketaatan sosial. Ketaatan sosial manakala tidak dilaksanakan atau dilakukan maka sanksi-sanksi sosial yang berlaku pada masyarakatlah yang menjadi hakimnya. Maka dari itu tidaklah berlebihan jika ketaatan pada hukum cenderung dipaksakan (Meta, 2011). “Taat berarti senantiasa tunduk, patuh” (Tim Penyusun Pusat

Bahasa, 2005:1116). Sedangkan ketaatan hukum dirumuskan sebagai “kepatuhan, kesetiaan, kesalehan, fungsi untuk membahayakan atau mengganggu kedamaian atau keadilan” (Tim Penyusun Pusat Bahasa, 2005:1116). Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ketaatan hukum adalah ketaatan yang dimulai dari kesadaran masyarakat terhadap hukum. Ketaatan hukum tidak hanya terwujud pada ketaatan dalam masyarakat maupun dikalangan pemerintahan saja, tetapi juga terwujud dalam instansi-instansi yang lain.

3. Masyarakat, sebagai kesatuan yang tetap berasal dari orang-orang di daerah tertentu dan bekerjasama dalam kelompok-kelompok, berdasarkan kebudayaan yang sama untuk mencapai kepentingan bersama (Soekanto, 1990:364). Masyarakat sebagai “manusia hidup atau sehimpunan orang yang tinggal bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan tertentu” (Widjaja, 1984:2). Masyarakat sebagai “kesatuan yang tetap dari orang-orang yang hidup di daerah tertentu dan bekerjasama dalam kelompok-kelompok, berdasarkan kebudayaan yang sama untuk mencapai kepentingan bersama” (Hendropuspito, 1991:75). Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat adalah sejumlah individu yang merupakan kesatuan tetap dimana hidup/tinggal di daerah tertentu berdasarkan kebudayaan yang sama untuk mencapai kepentingan bersama.
4. Tindak pidana, merupakan sesuatu perbuatan yang dapat dipidana, maka pembentuk undang-undang memberitahukan itu sebagai “bersifat melawan hukum, pembentuk undang-undang menyatakannya dalam suatu aturan

perundang-undangan pidana” (Roeslan, 1995). Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana (Halim, 1986). Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud tindak pidana adalah suatu perbuatan yang mempunyai sifat melawan hukum dan merugikan masyarakat sehingga perbuatan tersebut dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya dapat diancam dengan pidana.

5. Penadahan, dalam kamus hukum, penadahan merupakan suatu delik menurut pasal 480, 481 KUHP yaitu sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau karena ingin mendapatkan keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diperoleh karena kejahatan bahasa belanda heling, (Hamzah, 1986:453). Penadahan adalah “membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai jaminan hutang, menerima sebagai hadiah barang yang berasal dari kejahatan” (Anwar, 1982:17). Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud penadahan sepeda motor adalah sebagai perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau karena ingin mendapatkan keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu kendaraan yang memakai mesin (peralatan teknik) untuk menjalankannya diketahui atau sepatutnya harus diduga berasal dari kejahatan.

6. Sepeda motor, terdapat dalam kamus Bahasa Indonesia bahwa yang dimaksud dengan sepeda motor adalah “Sepeda adalah suatu alat transportasi yang digunakan untuk dikendarai atau dinaiki (seperti kuda, kereta, mobil dan motor), motor adalah kendaraan yang bermesin untuk dipergunakan” (Departemen Pendidikan Kebudayaan, 1994:478). Peralatan teknik dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak sepeda motor yang bersangkutan (UU No 14 tahun 1992). Pengertian sepeda motor dalam ketentuan ini adalah terpasang pada tempat sesuai dengan fungsinya. Termasuk dalam pengertian sepeda motor adalah kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan sepeda motor sebagai penariknya.